

MERUNTUHKAN FILSAFAT ILMU: SUATU USULAN UNTUK MEMBANGUN FILSAFAT RUMPUN ILMU

Nur Rahmad Yahya Wijaya

Dosen STIT Al Karimiyyah Beraji Gapura Sumenep

Pendahuluan

Filsafat ilmu telah mendefinisikan dan membatasi ilmu sebagai pengetahuan sistematis berdasarkan pengamatan indrawi. Ilmu, dengan ini, disyaratkan harus bersifat faktual-empiris, dan terbatas pada bidang-bidang fisik-indrawi. Yang disahihkan sebagai ilmu, dengan demikian, hanyalah sains dan teknologi. Dengan kriteria ini, semua ilmu dalam bidang-bidang nonfisik-nonindrawi yang bersifat nonfaktual-nonindrawi terdepak sebagai pengetahuan yang tidak sah alias bukan ilmu. Asumsi semacam ini tidak jarang diterima begitu saja dan sering tidak disadari bahwa itu hanyalah doktrin positivisme yang merasuk ke dalam filsafat ilmu.

Tulisan ini merupakan kritik terhadap filsafat ilmu. Tetapi, filsafat ilmu yang dimaksud adalah filsafat ilmu yang masih asli yang berasal dari daerah aslinya di Barat dengan pendekatannya yang positivistik. Kritik terhadap filsafat ilmu ini akan dilakukan dengan cara menguji kecukupan syarat yang harus dipenuhi oleh sistem pemikiran apapun yang namanya filsafat. Dari pengujian ini akan dilihat apakah sistem filsafat ilmu memenuhi syarat-syarat tersebut, dan apakah penyelidikannya terhadap hakikat ilmu sudah memadai bagi semua ilmu. Dan jika tidak, apa yang harus dilakukan terhadap filsafat ilmu. Dari kritik ini kemudian ditawarkan sebuah terobosan baru untuk merumuskan filsafat rumpun ilmu.

A. Pengertian Filsafat, Syarat-syarat Pemikiran Filsafat, dan Perlunya Filsafat Ilmu Memenuhi Syarat-syarat Ini

Aristoteles mendefinisikan filsafat secara tepat untuk objek material dan objek formalnya. Menurutnya, filsafat adalah suatu ilmu yang bertugas mempelajari

“being as being” (yang ada sebagaimana adanya). Kata ‘being’ pertama berarti ‘yang ada’. Namun, yang ada tidak terbatas, dan berarti seluruh kenyataan. Kata ‘as being’ berarti ‘sebagaimana adanya’, tegasnya, kenyataan seluruhnya. Maka, filsafat mempelajari seluruh kenyataan dan kenyataan seluruhnya. ‘Seluruh kenyataan’ berarti wilayah objek penyelidikannya paling luas, yaitu seluruh kenyataan; ini tentang objek materialnya. ‘Kenyataan seluruhnya’ berarti sudut pandangnya umum dan fundamen-tal; sehingga mencapai hakikat objek materialnya; ini menjelaskan objek formalnya.¹

Sebaliknya, penjelasan mengenai objek material dan objek formal filsafat ini sesuai dengan jawaban pertama apa syarat pemikiran filsafat di bawah ini. Tiga di antara syarat-syarat pemikiran filsafat berikut, yang pertama hanyalah perkataan lain dari definisi Aristoteles tentang objek formal filsafat.

Pertama, pemikiran filsafat haruslah menyeluruh atau meliputi semua hal (*comprehensive*). Filsafat harus memberikan penjelasan tentang kenyataan seluruhnya. Menurut sudut pandang ini, filsafat mencari kebenaran segala sesuatu, dan kebenaran ini harus dinyatakan dalam bentuk yang paling umum.²

Suatu sistem filsafat harus komprehensif, tidak ada sesuatu pun boleh berada di luar jangkauannya. Jika tidak, maka filsafat semacam itu harus ditolak karena berat sebelah dan tidak memadai. Suatu sistem filsafat memadai jika memuat penjelasan mengenai semua gejala. Salah satu cara mengecam suatu sistem filsafat adalah dengan menunjukkan bahwa sistemnya melupakan sesuatu yang tidak diberikan tempat di dalamnya. Jika suatu sistem filsafat melupakan sesuatu, ada dua kemungki-nan harus dilakukan. *Pertama*, sistemnya harus diperluas supaya memadai semua hal yang tercakup di dalamnya. *Kedua*, jika perluasan tidak mungkin, maka tidak ada cara lain selain menegaskan bahwa sistem filsafat yang demikian harus ditolak.³

¹ Bandingkan K. Bertens, *Sejarah Filsafat Yunani* (Yogyakarta: Kanisius, 2002), 186, Jan Hendrik Rapar, *Pengantar Filsafat* (Yogyakarta: Kanisius, 1998), 15, Lasiyo dan Yuwono, *Pengantar Ilmu Filsafat* (Yogyakarta: Liberty, 1985), 5-6. Jika rumusan definisi filsafat menurut Aristoteles di atas dirangkumkan maka akan berbunyi seperti ini. Filsafat adalah ilmu yang bertugas mempelajari seluruh kenyataan, dan tiap-tiap dari kenyataan yang dipelajari tersebut diselidiki menurut aspek-aspeknya yang paling umum dan paling fundamental, dan juga menurut seluruh aspeknya, sehingga bersifat *kenyataan seluruhnya*, dan bukan menurut sebagian aspeknya atau menurut aspek tertentu saja.

² Louis O. Kattsoff, *Pengantar Filsafat*, terj. Soejono Soemargono (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2004), 12.

³ *Ibid.*

Kedua, pemikiran filsafat mengharuskan bahwa sistemnya harus koheren. Perenungan kefilosofan harus menyusun suatu bagan konseptual yang koheren. 'Koheren' ialah runtut. Kata 'runtut' ('consistent') dimengerti melalui kebalikannya, yaitu 'tidak runtut' ('inconsistent') atau 'bertentangan' ('contradictory'). Suatu pemikiran filsafat tidak boleh mengandung pernyataan-pernyataan bertentangan satu sama lain. Mengapa? Karena filsafat berusaha menyelesaikan pertanyaan-pertanyaan agar dimengerti. Penyelesaian dilakukan dengan menyampaikan pernyataan yang terbukti benar, atau terbukti kebenarannya dibandingkan pernyataan-pernyataan lain. Penyelesaian tidak mungkin jika dikatakan bahwa suatu pernyataan benar dan pernyataan yang bertentangan juga benar. Di dalam suatu pemikiran yang tidak berpegang pada suatu pernyataan tunggal, tidaklah mungkin ada pemikiran yang masuk akal.⁴

Ketiga, pemikiran filsafat mengharuskan sistemnya merupakan suatu bagan konseptual. Konsepsi (rencana kerja) adalah hasil generalisasi dan abstraksi tentang hal-hal satu demi satu. Filsafat, karenanya, adalah pemikiran tentang hal-hal dalam hubungan yang umum. Dalam hal ini, filsafat harus menyusun suatu hubungan erat satu sama lain di antara jawaban-jawabannya. Jawaban pertanyaan yang satu bersangkutan dengan jawaban pertanyaan-pertanyaan lainnya.⁵

Susunan sistematika filsafat ditegaskan pertama kali oleh Immanuel Kant. Menurutnya, filsafat bertolak dari tiga pertanyaan. Pertanyaan "Apa yang dapat diketahui?" dijawab oleh filsafat pengetahuan atau epistemologi, "Apa yang dapat diharapkan?" dijelaskan oleh filsafat kenyataan atau metafisika, dan "Apa yang seharusnya dilakukan?" dijawab oleh filsafat nilai atau etika.⁶

Sesuai syarat pemikiran filsafat *ketiga*, konseptual, ketiga bagian sistematika filsafat ini harus berkaitan satu sama lain.⁷ Setidaknya, kaitan ini harus terjadi

⁴ *Ibid.*, 8-9.

⁵ *Ibid.*, 7-8. Tentang perlunya jawaban-jawaban kefilosofan agar berhubungan satu sama lain, Louis O. Kattsoff memberikan penjelasan lebih lanjut. Menurutnya, corak filsafat yang dianut oleh seseorang semestinya ditentukan oleh penyelesaian-penyelesaian yang disarankannya untuk memecahkan persoalan-persoalan yang ditentukan secara garis besarnya. Perbedaan antara kebanyakan orang dengan seorang filsuf terletak pada tingkat keruntutannya. Seorang filsuf mencoba membuat sistemnya sebagai suatu sistem yang runtut sehingga menunjukkan kelurusan garis (*Ibid.*, 105.).

⁶ Lihat dan bandingkan dalam F. Budi Hardiman, *Filsafat Modern dari Machiavelli sampai Nietzsche: Suatu Pengantar dengan Teks dan Gambar* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004), 132 dan Donny Gahril Adian, *Menyoal Objektivisme Ilmu Pengetahuan: dari David Hume sampai Thomas Kuhn* (Jakarta: Teraju, 2002), 4.

⁷ Sidi Gazalba, *Sistematika Filsafat: Buku IV: Pengantar kepada Teori Nilai* (Jakarta: Bulan Bintang, 1973), 441.

antara epistemologi dan metafisika. Pada dasarnya, pertanyaan-pertanyaan epistemo-logi umumnya ialah pertanyaan metafisika. Dalam pengertian tertentu, bahkan sama derajatnya. *Bagaimana cara* mengetahui kenyataan (epistemologi) menentukan *apa* yang dapat diketahui (metafisika).⁸ Lalu, dengan menentukan *bagaimana cara* mengetahui kenyataan, dapat menetapkan filsafat ilmu: pengetahuan ilmiah tentang apa yang *kesahihannya dapat dibuktikan*. Berikutnya dijelaskan kesahihan pengeta-huan adalah persoalan epistemologi yang diseriuisi oleh filsafat ilmu.

Objek material filsafat adalah seluruh kenyataan, dan objek formalnya adalah kenyataan seluruhnya. Di antara seluruh kenyataan adalah ilmu. Maka, penyelidikan filsafat terhadap ilmu bersifat kenyataan seluruhnya; maksudnya, menurut aspeknya yang paling fundamental, paling umum, sehingga penyelidikannya terhadap ilmu mampu menjelaskan seluruh apa yang namanya ilmu, dan bukan hanya sebagian ilmu.⁹ Beginilah sejatinya filsafat ilmu. Filsafat ilmu akan dikritik sebagai berat sebelah jika penjelasannya melupakan suatu atau beberapa ilmu. Filsafat ilmu harus ditolak jika suatu atau beberapa ilmu berada, atau dianggap berada, di luar jangkauannya. Lebih dari itu, jika filsafat ilmu dikehendaki menjadi perenungan filsafati yang utuh, ketiga syarat di atas juga harus dipenuhi.

B. Posisi Filsafat Ilmu dalam Sistematika Filsafat dan Tugasnya

Dilihat dari sistematika filsafat, filsafat ilmu termasuk bagian epistemologi. Bersama filsafat ilmu, epistemologi juga mengkaji hakikat pengetahuan. Bedanya, jika epistemologi menelaah hakikat pengetahuan seluasnya, filsafat ilmu hanya mene-lisik hakikat pengetahuan sah yang tersusun sistematis, yang disebut ilmu.

Berbeda dengan filsafat ilmu, epistemologi menelaah lima persoalan, yaitu sumber pengetahuan, metode, struktur, batas-batas, dan kesahihan pengetahuan.¹⁰ Ber-kenaan yang terakhir, yaitu persoalan kesahihan, kebenaran, keabsahan, atau validitas pengetahuan, epistemologi membedakan pengetahuan yang benar dari

⁸ Louis O. Kattsoff, *Pengantar Filsafat*, 74 dan 107.

⁹ Rujuk silang penjelasan di atas catatan kaki nomer 67.

¹⁰ Bandingkan M. Amin Abdullah, "Aspek Epistemologis Filsafat Islam" dalam Irma Fatimah, ed., *Filsafat Islam: Kajian Ontologis, Epistemologis, Aksiologis, Historis, Prospektif* (Yogyakarta: LESFI, 1992), 28, M. Amin Abdullah, *Studi Agama: Normativitas atau Historisitas?* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), 243, Donny Gahril Adian, *Menyoal Objektivisme Ilmu...*, 5, Louis O. Kattsoff, *Pengantar Filsafat*, 74, dan P. Hardono Hadi, "Pengantar" dalam Kenneth T. Gallagher, *Epistemologi (Filsafat Pengetahuan)*, ed. P. Hardono Hadi (Yogyakarta: Kanisius, 1999), 5.

yang salah. Karenanya, sekumpulan pengetahuan sah yang disusun sistematis diputuskan sebagai pengetahuan ilmiah atau ilmu, dan dibedakan dari pengetahuan prailmiah yang belum teruji kesahihannya. Jika suatu ilmu diputuskan sebagai pengetahuan yang tidak sah dan bukan ilmu, maka pengetahuan tersebut tidak berlaku. Itu karena permasalahan yang ada dalamnya dianggap tidak dapat ditolak, tetapi juga dianggap tidak terbukti kesahihannya.¹¹ Ini berkaitan dengan putusan¹² kesahihan. Kesahihan pengetahuan, yang awalnya adalah kajian epistemologi, kemudian diseriusi filsafat ilmu. Jika ditanya apa kajian utama filsafat ilmu, jawabannya adalah kesahihan pengetahuan. Tegasnya, filsafat ilmu menjawab pertanyaan apakah ilmu itu?

Pembatasan berbagai kumpulan pengetahuan kepada yang sah dan disebut sebagai ilmu menjadi tugas utama filsafat ilmu. Filsafat ilmu adalah satu-satunya hakim pemutus pembatas apa ilmu, dan apa bukan ilmu karena dianggap tidak terbukti kesahihannya. Segala kumpulan pengetahuan tersusun sistematis dipertang-gungjawabkan kesahihannya di depan Hakim Agung bernama Filsafat Ilmu.

D. Menguji Filsafat Ilmu dengan Tiga Syarat Pemikiran Filsafat

Tujuan penulisan artikel ini dimaksudkan sebagai kritik atas filsafat ilmu. Namun, filsafat ilmu yang dimaksud adalah yang paling lazim, yang masih asli dari Barat, yaitu yang dipahami dalam kerangka positivisme. Tanggapan kritis ini akan dilakukan dengan cara menguji tingkat kecukupannya, setidaknya, dalam memenuhi patokan tiga syarat pemikiran filsafat.

Di antara syarat pemikiran filsafat, syarat *ketiga* mengharuskan sistemnya sebagai suatu bagan konsepsional. Telah disebutkan, setidaknya, kaitan erat di dalam sistem filsafat harus terjadi di antara filsafat yang menelisik masalah pengetahuan (epistemologi) dan kenyataan (metafisika). Di sini akan diuji apakah keduanya saling berkaitan di dalam sistem filsafat ilmu.

Positivisme, sebagai pendekatan dalam filsafat ilmu, sebenarnya merupakan jawaban atas pertanyaan metafisika: Apa kenyataan terakhir itu? Jawaban atas pertanyaan ini telah melahirkan dua aliran besar filsafat: materialisme dan

¹¹ Murtadha Muthahhari, , *Pengantar Ilmu-ilmu Islam*, terj. Ibrahim Husain al Habsyi dkk (Jakarta: Pustaka Zahra, 2003), 311.

¹² Putusan, di dalam filsafat, termasuk persoalan yang sangat pelik. Untuk mengerti lebih dalam tentang persoalan ini baca, misalnya, Lorens Bagus, *Kamus Filsafat* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2000), 915-919.

spiritualisme. Jika materialisme menyatakan bahwa akar dari semua kenyataan adalah materi, maka, bagi spiritualisme adalah ruh.¹³

Jika ditelusuri, positivisme pun sebenarnya hanyalah cabang materialisme.¹⁴ Sebagai submaterialisme, positivisme pun menegaskan bahwa materi adalah kenyataan terakhir, atau dasar seluruh kenyataan adalah materi, dan ruh sebagai kenyataan itu tidak ada. Itu karena – dengan bantuan empirisme (pengetahuan berasal dari pengamatan indrawi) – yang dapat diketahui hanyalah apa saja sejauh dapat diamati secara indrawi; maka, objek pengetahuan adalah fakta, dan pengetahuan yang sah atau ilmu hanyalah yang faktual-empiris, yaitu sains. Yang tidak dapat diamati secara indrawi, yaitu yang melampaui fakta atau yang nonfaktual-nonempiris tidak dapat diketahui; maka, tidak dapat dibuktikan kesahihan status ontologisnya alias tidak ada; maka, pengetahuan yang dibangun di atasnya adalah pengetahuan yang tidak sah, salah, dan bukan ilmu.

Menjadi jelaslah bahwa dalam hal ini positivisme telah menyusun suatu bagan sistem pemikiran konsepsional. Di dalam positivisme, persoalan-persoalan epistemo-logi, filsafat ilmu, dan metafisika dijawab dengan penyelesaian saling berhubungan. Apakah syarat konsepsional ini lantas juga dipenuhi oleh sistem filsafat ilmu?

Filsafat ilmu, dalam bentuknya yang asli, dalam penerapannya juga mematuhi usulan positivisme Comte. Bagaimanapun, filsafat ilmu sebenarnya merupakan wadah untuk menerapkan positivisme secara massal, supaya tidak hanya dianut oleh Comte, para filsuf dan ilmuwan positivis, dan sedikit orang.

Filsafat ilmu memang tidak mempersoalkan apa hakikat seluruh kenyataan, dan metafisika memang bukan bagian dari pembahasannya. Asumsi metafisika positivistik, sebagai pendekatannya, juga tidak dinyatakan secara eksplisit. Namun, di dalam filsafat ilmu, penerapan metafisika positivistik atas persoalan-persoalan hakikat ilmu sangatlah eksplisit. Lihat, misalnya, saat filsafat ilmu menjelaskan apa yang disebut ilmu, apa metode ilmiah itu, apa tahapan-tahapan di dalam metode ilmiah, dan apa syarat-syarat ilmu. Justru karena asumsi metafisikanya yang positivistik inilah filsafat ilmu hanya membicarakan persoalan-persoalan keilmuan faktual-empiris yang pada dasarnya berhakikat positivistik. Filsafat ilmu, dengan demikian, juga telah mampu menyusun sistemnya menjadi suatu bagan pemikiran yang konsepsional.

¹³ Tentang materialisme dan spiritualisme ini baca misalnya Sidi Gazalba, *Sistematika Filsafat: Buku III: Pengantar kepada Metafisika* (Jakarta: Bulan Bintang, 1973)

¹⁴ *Ibid.*, 293.

Selanjutnya, syarat *kedua*, sistem pemikiran filsafat haruslah koheren. Dengan berdiri di atas pijakan positivisme dan metafisikanya yang materialistik, filsafat ilmu hanya menganggap sah ilmu-ilmu faktual-empiris. Di dalam filsafat ilmu disetujui bahwa filsafat ilmu adalah filsafat yang menyelidiki ilmu yang berhakikat material, atau yang dibangun di atas kenyataan faktual-empiris, dan ilmu yang dimaksud adalah ilmu-ilmu kealaman atau sains dan teknologi. Tentu tidak masuk akal jika di dalam filsafat ilmu yang positivistik ini, ilmu-ilmu faktual-empiris dan ilmu-ilmu nonfaktual-nonempiris sama-sama diselidiki. Dengan meneliti keduanya berarti membenarkan keduanya, dan ini bertentangan dan tidak masuk akal. Dan, tentu saja ini tidak dilakukan oleh filsafat ilmu. Syarat koheren ternyata juga telah dipenuhi oleh sistem filsafat ilmu.

Yang terakhir, syarat *pertama* yang disebutkan di atas, pemikiran filsafat haruslah bersifat menyeluruh (*comprehensive*). Filsafat ilmu haruslah mampu menjelaskan hakikat ilmu secara menyeluruh, baik menurut objek materialnya, maupun objek formalnya. Menurut objek materialnya, objek filsafat ilmu adalah seluruh pengetahuan sah, yang disebut ilmu; sedangkan menurut objek formalnya, objeknya adalah landasan ontologis, epistemologis, dan aksiologis seluruh ilmu.¹⁵ Dengan asumsi metafisikanya yang materialistik, dan dengan membatasi kesahihan ilmu pada yang faktual-empiris, yang dapat diamati secara indrawi dengan metode ilmu kealaman, filsafat ilmu ternyata hanya berminat menjelaskan sebagian, dan bukan seluruh ilmu. Yang dijelaskannya hanyalah hakikat ilmu-ilmu kealaman dan objek formalnya. Filsafat ilmu, karenanya, tidak mencari kebenaran tentang seluruh ilmu, dan kebenaran yang dinyatakan di dalam filsafat ilmu hanyalah kebenaran yang dinyatakan dalam bentuk yang lebih parsial dan lebih fragmentaris.

Dengan kata 'filsafat ilmu', dengan pendekatannya yang positivistik, sebenarnya telah memaksudkan, paling tidak, empat hal. *Pertama*, bahwa kaidahnya bukan hanya merupakan kaidah yang menjelaskan hakikat ilmu sejati, tetapi juga menghasilkan ilmu sejati. *Kedua*, ilmu yang sejati adalah ilmu kealaman. *Ketiga*, pengetahuan sistematis lain yang tidak sesuai dengan kaidahnya bukanlah ilmu yang sejati, dan dengan demikian adalah ilmu yang salah. *Keempat*, berbagai pengetahuan sistematis lain dapat menjadi ilmu sejati jika dapat berusaha menyesuaikan diri dengan kaidahnya yang bersifat positivistik dan faktual-empiris.

¹⁵ Bandingkan Surajiyo, *Filsafat Ilmu dan Perkembangannya di Indonesia: Suatu Pengantar* (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), 48. Bandingkan juga penjelasan di atas catatan kaki nomor 9.

Seharusnya, dengan kata 'filsafat ilmu', filsafat ini bermakna filsafat, tegasnya ilmu, yang menyelidiki hakikat seluruh ilmu, baik yang faktual-empiris, maupun yang nonfaktual-nonempiris. Dengan pengertian yang paling sejati ini, filsafat ilmu semestinya mampu menjelaskan kebenaran mengenai hakikat seluruh ilmu, baik ilmu-ilmu dalam rumpun sosial, humaniora, dan keagamaan; dan bukan hanya ilmu-ilmu rumpun kealaman.

Namun, dengan pandangan dunianya yang materialistik, filsafat ilmu akan sangat tidak konsepsional dan tidak koheren jika dalam penyelidikannya juga dibahas hakikat ilmu-ilmu yang bersifat nonfaktual-nonempiris; tidak konsepsional karena posisi materialismenya hanya mampu menentukan kebenaran ilmu yang dibangun di atas kenyataan faktual-empiris; tidak koheren atau bertentangan karena posisi materialismenya juga hanya akan membuatnya menyatakan suatu pernyataan ganda yang saling bertentangan satu sama lain. Dengan posisi materialismenya, tidak masuk akal jika di dalam filsafat ilmu dibahas, baik ilmu-ilmu faktual-empiris, maupun ilmu-ilmu nonfaktual-nonempiris. Jika filsafat ilmu membahas keduanya berarti filsafat ilmu akan menyatakan secara implisit bahwa ilmu-ilmu faktual-empiris itu pengetahuan yang sah, dan yang sebaliknya, ilmu-ilmu nonfaktual-nonempiris juga benar; dan ini tidak masuk akal, mengingat posisi materialismenya.¹⁶

Dengan pendekatan materialismenya, filsafat ilmu sudah membangun sistem yang konsepsional dan koheren. Konsepsional, karena pertanyaan-pertanyaan epistemologi, filsafat ilmu, dan metafisika yang diajukan kepadanya dijawabnya secara saling berhubungan. Pertanyaan epistemologi: *bagaimana cara* mengetahui itu, jawabannya: dengan pengalaman atau pengamatan indrawi melalui metode ilmu kealaman. Pertanyaan metafisika: *apa* yang dapat diketahui dengan pengamatan indrawi, jawabannya: seluruh kenyataan yang pada dasarnya

¹⁶ Akan menjadi terkesan semau-maunya, tidak runtut, bertentangan, dan tidak masuk akal seumpama ada orang yang mengaku diri sebagai seorang materialis, tetapi, pada saat yang bersamaan, dia juga menyatakan bahwa hakikat terdalam dari seluruh kenyataan adalah ruh. Seseorang akan dikatakan tidak masuk akal jika ia mengaku sebagai seorang materialis, dan juga spiritualis pada saat yang bersamaan. Mengapa demikian? Karena kenyataan spiritual atau kenyataan ruhani itu lebih dalam daripada kenyataan material. Jika seseorang hanya bisa membenarkan satu-satunya kenyataan material sebagai kenyataan yang terdalam, adalah absurd jika ia juga menerima kenyataan ruhani sebagai kenyataan terakhir.

Hal ini akan menjadi lain persoalan jika seseorang menganut keyakinan bahwa kenyataan yang terakhir adalah kenyataan yang bersifat ruhani. Seseorang pada posisi spiritualisme masih masuk akal jika ia meyakini adanya kenyataan spiritual dan bahwa yang bersifat spiritual adalah akar dari seluruh kenyataan, tetapi, pada saat yang sama, ia juga percaya bahwa kenyataan yang bersifat material juga tidak dapat dipungkiri keberadaannya.

tersusun dari kenyataan material yang bersifat faktual-empiris. Dan gabungan pertanyaan filsafat ilmu dan metafisika: *pengetahuan yang sah* atau *ilmu* mengenai *apa* yang kesahihannya dapat dibuktikan. Filsafat ilmu akan menjawab, meskipun tidak selalu eksplisit, bahwa pengetahuan yang sah hanyalah yang disusun di atas kenyataan material yang faktual-empiris dan dapat diamati secara indrawi. Kenyataan spiritual yang nonfaktual-nonempiris tidak dapat diketahui, karena yang dapat diketahui hanyalah yang dapat diketahui secara indrawi; maka kenyataan seperti itu tidak ada. Pengetahuan yang disusun di atas kenyataan nonfaktual-nonempiris, karenanya, adalah pengetahuan yang tidak sah, salah, dan tidak dapat dianggap sebagai ilmu.

Dengan pendekatan materialismenya, filsafat ilmu juga sudah membangun sistem yang koheren, runtut, dan tidak bertentangan. Dengan pendekatannya yang positivistik-materialistik, dan seterusnya membatasi pengetahuan yang sah kepada ilmu-ilmu faktual-empiris, dan sebaliknya, mengeluarkan ilmu-ilmu nonfaktual-nonempiris dari wilayah ilmu, filsafat ilmu telah menerangkan kebenaran di dalam suatu pernyataan tunggal dan masuk akal.

Tetapi, konsekuensinya, dengan posisinya yang materialistik, filsafat ilmu sudah gagal menyusun suatu sistem pemikiran filsafat tentang hakikat keilmuan secara komprehensif, dan tidak dapat memenuhi tuntutan objek material dan objek formal filsafat yang semestinya bersifat seluruhnya.

Jika demikian, marilah dibuat suatu pengandaian. Jika filsafat ilmu bermaksud menerangkan mengenai hakikat seluruh ilmu, baik ilmu-ilmu faktual-empiris sendiri, maupun ilmu-ilmu nonfaktual-nonempiris; tegasnya seluruh rumpun ilmu yang terdiri dari rumpun ilmu-ilmu kealaman, kesosialan, humaniora, dan keagamaan, lalu merubah haluannya dari pendekatannya yang materialistik kepada pendekatan spiritualistik, apakah mungkin filsafat ilmu akan mampu menerangkan hakikat seluruh ilmu?

Pembahasan ini berkenaan dengan kenyataan bahwa setiap rumpun ilmu pada dasarnya memiliki hakikatnya masing-masing. Setiap rumpun ilmu, semestinya, dan pada dasarnya, memiliki pengertian, ciri-ciri, dan metode ilmiahnya sendiri, yang berbeda satu sama lain. Dan persoalan-persoalan yang variatif tentang hakikat keilmuan yang beragam ini, karenanya, tidak mungkin dipersatukan menjadi satu kata 'filsafat ilmu'. Tidak mungkin ada satu filsafat ilmu yang bisa menjelaskan, misalnya, pengertian ilmu, ciri-ciri ilmu, metode ilmu dengan satu bahasa yang benar bagi semua ilmu. Maka, tidak ada satu filsafat ilmu untuk semua rumpun ilmu.

Jelaslah bahwa dengan cara mengubah pendekatannya pun, filsafat ilmu juga mustahil membangun suatu sistem yang komprehensif dan bersifat seluruhnya tentang hakikat semua ilmu. Sekali lagi, itu karena masing-masing rumpun keilmuan memiliki hakikatnya sendiri, yang berbeda satu sama lain.

Kembali ke permasalahan. Jika – dan memang demikian adanya – filsafat ilmu ternyata berat sebelah dan tidak memadai, karena masih banyak ilmu yang berada di luar jangkauannya, dan karenanya gagal menyusun suatu sistem filsafat ilmu yang komprehensif, dan demikian pula mustahil memperluas sistemnya supaya mencakup semua ilmu, apakah filsafat ilmu dengan pendekatan positivistik ini harus ditolak?

Untuk menjawab persoalan ini, setidaknya, ada empat jawaban yang mungkin ditawarkan. *Pertama*, sistem filsafat ilmu harus diperluas. Namun, sudah dimengerti bahwa perluasan tidak mungkin dilakukan karena masing-masing rumpun ilmu memiliki hakikatnya sendiri yang berbeda satu sama lain.

Kedua, karena perluasan sistem filsafat ilmu juga tidak mungkin dilakukan, karena berkenaan dengan hakikat keilmuan yang variatif, tetapi juga karena berkaitan dengan asumsi metafisikanya yang materialistis, maka, yang perlu ditolak sebenarnya hanyalah dimensi positivisme dan materialismenya. Dimensi materialisme di dalam filsafat ilmu harus ditolak, karena penerimaan paham ini mengandung konsekuensi membenaran terhadap kenyataan material saja, dan penolakan terhadap hakikat kenyataan ruhani. Penolakan terhadap kenyataan ruhani sebagai kebenaran dan kenyataan terakhir dapat membuat orang terjatuh kepada atheisme, atau kehilangan iman kepada Tuhan. Begitu pun, dimensi positivistik filsafat ilmu harus ditolak, karena keyakinan bahwa pengetahuan yang sah hanyalah yang disusun di atas kenyataan faktual-empiris akan menyebabkan bukan hanya sikap tidak hormat dan meremehkan ilmu-ilmu keagamaan yang menyusun pengetahuan yang sah mengenai Tuhan, yang dengan ilmu-ilmu inilah seseorang bisa beragama dengan cara yang lebih baik dan beriman dengan keimanan yang benar; tetapi juga sikap arogansi intelektual, yang merendahkan kesahihan ilmu-ilmu lain selain ilmu-ilmu kealaman.

Ketiga, karena perluasan sistemnya tidak mungkin; penolakannya juga tidak perlu secara keseluruhan, tetapi hanya dimensi positivistik, materialistik, atheistiknya saja; dan mengingat bahwa kata ‘filsafat ilmu’ semestinya menyelidiki hakikat ilmu seluruhnya, dan tuntutan ini tidak dapat dipenuhinya; maka, filsafat ilmu yang hanya menelisik hakikat ilmu-ilmu kealaman ini perlulah kiranya mengubah namanya menjadi ‘filsafat rumpun ilmu kealaman’.

Dengan mempersempit dan mengubah nama ‘filsafat ilmu’ menjadi ‘filsafat rumpun ilmu kealaman’, syarat bahwa pemikiran filsafat haruslah bersifat komprehensif atau memadai dapatlah terpenuhi. Dengan namanya yang baru inipun, filsafat rumpun ilmu kealaman menjadi lebih netral dan tidak berat sebelah, karena yang dibahasnya hanyalah hakikat ilmu-ilmu kealaman. Filsafat rumpun ilmu kealaman ini, sesuai dengan namanya, juga masih bisa menggunakan pendekatan faktual-empiris. Bahkan, dengan dihilangkannya dimensi materialistik, positivistik, dan atheistiknya, sebagaimana telah disarankan; filsafat rumpun ilmu kealaman ini bukan hanya menjadi lebih menyelamatkan bagi keimanan kepada Tuhan; melainkan juga menjadi lebih santun, karena tidak sembarang menganggap remeh dan tidak sah rumpun ilmu-ilmu lain.

Keempat, mengingat filsafat ilmu dengan pendekatan positivisme ini telah diruntuhkan, dengan alasan tidak komprehensif atau tidak sesuai dengan tuntutan objek material dan objek formal filsafat yang semestinya bersifat seluruhnya, kemudian ‘dijinakkan’ dengan cara menghilangkan unsur materialistik, positivistik, dan atheistiknya, dan seterusnya diganti nama menjadi filsafat rumpun ilmu kealaman, maka perlulah sekarang dibangun filsafat rumpun ilmu.

E. Perlunya Merumuskan Filsafat Rumpun Ilmu

Setelah filsafat ilmu diruntuhkan dan berubah menjadi filsafat rumpun ilmu kealaman, maka semua rumpun ilmu sisanya telah kehilangan fondasi awalnya, yang pada dasarnya memang tidak sesuai, sudah rapuh, dan bahkan sangat mampu merobohkan bangunan-bangunan keilmuan yang ada di atasnya. Bahkan juga secara tegas harus dikatakan bahwa semua rumpun ilmu selain rumpun ilmu kealaman telah merdeka dan mampu menentukan nasibnya sendiri.

Setiap rumpun ilmu memiliki pengertian, ciri-ciri, dan metode ilmiah yang berbeda. Setiap rumpun ilmu, dengan demikian, pada dasarnya memiliki hakikatnya masing-masing. Dengan runtuhnya filsafat ilmu, dan terlepas dari itu tiap-tiap rumpun ilmu memang memiliki hakikat yang berbeda,¹⁷ maka perlulah dibangun filsafat rumpun ilmu yang khas bagi tiap rumpun ilmu.

¹⁷ Di sini, penulis tidak sepakat dengan Suriasumantri yang menyatakan bahwa secara metodologis tidak dibedakan antara ilmu-ilmu alam dengan ilmu-ilmu sosial. Dia juga menambahkan bahwa tidak terdapat perbedaan yang prinsipil antara keduanya, di mana keduanya mempunyai ciri-ciri keilmuan yang sama (Lihat Jujun S. Suriasumantri, *Filsafat Ilmu: Sebuah Pengantar Populer* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1987), 94.). Hal ini berbeda sama sekali dengan pendapat suatu tulisan yang ia terjemahkan sendiri (Baca Deobold B. Van Dalen, “Ilmu-ilmu Alam dan Ilmu-ilmu Sosial: Beberapa Perbedaan”, terj. Jujun S. Suriasumantri dalam Jujun S. Suriasumantri, ed.,

Dengan kata ‘filsafat rumpun ilmu’ tentu tidak dimaksudkan sebagai nama umum. Yang dimaksud adalah berbagai filsafat rumpun ilmu. Selain filsafat rumpun ilmu kealaman – sebagai metamorfosis filsafat ilmu –, perlu juga dirumuskan ‘filsafat rumpun ilmu kesosialan’, ‘filsafat rumpun ilmu humaniora’, dan ‘filsafat rumpun ilmu keagamaan Islam’.

Pada umumnya, adalah tugas filsafat untuk menemukan tempat berpijak bagi kegiatan keilmuan.¹⁸ Dan, sebaliknya, jika seseorang ingin mengokohkan kesahihan suatu rumpun ilmu, maka bangunlah filsafatnya. Berbagai filsafat rumpun ilmu yang disesuaikan dengan hakikat masing-masing rumpun ilmu perlu dibangun agar kebenaran rumpun ilmunya dapat dipertanggungjawabkan secara filsafati-ilmiah.

Berkenaan dengan persoalan ini, maka, perguruan tinggi berbasis ilmu pendidikan, misalnya, harus merumuskan filsafat rumpun ilmunya yang khas. Alih-alih tetap menggunakan filsafat ilmu yang positivistik, yang dalam tulisan ini sudah diruntuhkan, atau filsafat rumpun ilmu kealaman, yang sebenarnya tidak tepat dan tidak perlu, demi tujuan spesialisasi keilmuan, perguruan tinggi berbasis ilmu pendidikan harus merumuskan filsafat rumpun ilmu yang tepat. Karena ilmu pendidikan merupakan ilmu sosial terapan – yang mengaplikasikan berbagai konsep psikologi, antropologi, dan sosiologi –, maka filsafat rumpun ilmu yang sesuai untuk para pengkaji ilmu pendidikan adalah filsafat rumpun ilmu kesosialan. Mata Kuliah dan Silabus Filsafat Ilmu –, jika terpaksa disebut demikian – perlu dirumuskan kembali di perguruan tinggi ilmu pendidikan.

Begitu pula, semestinya juga dirumuskan suatu filsafat rumpun ilmu yang tepat untuk suatu perguruan tinggi berbasis keilmuan interdisipliner. Sebuah perguruan tinggi berbasis ilmu pendidikan Islam, misalnya, harus menyusun suatu filsafat rumpun ilmu yang lebih khas. Karena ilmu pendidikan termasuk bagian dari rumpun ilmu-ilmu kesosialan, maka kajian filsafatnya adalah filsafat rumpun ilmu kesosialan; tetapi karena ilmu pendidikan yang dimaksud bercorak keilmuan Islam, maka kajian filsafatnya adalah filsafat rumpun ilmu keislaman. Dengan demikian, perguruan tinggi berbasis pendidikan Islam semestinya menyusun suatu filsafat rumpun ilmu kesosialan-keislaman. Atau sebagai langkah awal, barangkali,

Ilmu dalam Perspektif: Sebuah Kumpulan Karangan tentang Hakikat Ilmu (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2001), h. 134-139.).

¹⁸ Will Durant memperumpamakan bahwa filsafat ibarat marinir yang merebut pantai, dan ilmu ibarat pasukan infantri yang membelah gunung dan merambah hutan (Lihat Jujun S. Suriasumantri, *Filsafat Ilmu...*, 22-24.).

Mata Kuliah Filsafat Ilmu – sekali lagi, jika harus disebut demikian – yang semestinya diajarkan di perguruan tinggi pendidikan Islam harus memuat dua macam materi perkuliahan: materi perkuliahan filsafat rumpun ilmu kesosialan dan filsafat rumpun ilmu keislaman.

Filsafat ilmu sendiri, dengan pendekatannya yang positivistik, telah mendefinisikan dan membatasi ilmu secara semena-mena sebagai dan kepada sains. Sains pun hanya mengacu kepada apa yang secara kolektif menunjukkan bermacam-macam *natural sciences* (ilmu-ilmu kealaman), yang mana metodenya bersifat faktual-empiris, dan bermaksud memberi tafsiran kepada alam secara kualitatif dan matematis. Selain itu, istilah ‘sains’, ternyata juga digunakan untuk menunjukkan suatu metode untuk memperoleh pengetahuan yang sah, yang disebut dengan metode ilmiah. Dalam arti ini, istilah sains menjadi sinonim dengan metode ilmiah.¹⁹ Tetapi, perlu ditegaskan juga, sebagaimana sudah disinggung, bahwa metode ilmiah di dalam filsafat ilmu juga dibatasi pengertiannya sebagai metode ilmu kealaman, yang mana penerapannya hanya akan menghasilkan ilmu kealaman saja. Tentu ini merupakan *circle of phantom* saja.

Bagaimanapun juga, di dalam filsafat ilmu, dengan membatasi ilmu sebagai sains atau *natural sciences*, penyelidikan seksama tentang ilmu-ilmu kealaman ternyata telah gagal merumuskan satu-satunya metode ilmiah yang bisa diterapkan untuk semua ilmu kealaman. Di dalam filsafat ilmu, yang hanya membahas rumpun ilmu kealaman ini, dengan demikian, terdapat beberapa metode ilmiah, dan bukan satu-satunya metode ilmiah. Tiap metode yang dipakai tergantung pada watak bahan dan problema yang dijadikan penyelidikan.²⁰

Sesuatu itu dapat diselidiki selama, dan hanya jika, metode yang digunakan dapat diterapkan. Dengan kata lain, apa yang dapat diperoleh dari suatu penyelidikan ilmiah hanyalah apa yang dapat ditemukan oleh metode yang digunakan.²¹ Ringkasnya, jika yang digunakan adalah metode yang bersifat faktual-empiris, maka yang akan ditemukan hanyalah pengetahuan yang bersifat faktual-empiris atau ilmu-ilmu kealaman. Ungkapan ini menjelaskan betapa di dalam metode ilmiah terdapat suatu keterbatasan yang bersifat inheren.²² Ini juga

¹⁹ Harold H. Titus, Marilyn S. Smith, dan Richard T. Nolan, *Persoalan-persoalan Filsafat*, terj. H. M. Rasyidi (Jakarta: Bulan Bintang, 1984), 260.

²⁰ *Ibid.*, 261.

²¹ *Ibid.*, 267.

²² *Ibid.*

menjelaskan: *pertama*, bahwa tidak ada satu filsafat ilmu dengan metode ilmiahnya yang bisa menafsirkan, menerapkan, dan menghasilkan seluruh rumpun keilmuan; *kedua*, bahwa antara filsafat ilmu dan metode ilmiahnya terdapat hubungan yang sangat erat; *ketiga*, bahwa inti pokok persoalan di dalam filsafat ilmu berpendekatan positivistik ini sebenarnya terletak pada metode ilmiah, yang sebenarnya hanyalah metode ilmu kealaman.

Jadi, apa yang bernama 'filsafat ilmu' sebenarnya hanyalah suatu usaha untuk *menafsirkan* kenyataan alam secara kualitatif dan matematis, dengan *menerapkan* metode ilmiah, yang pada dasarnya hanya bersifat faktual-empiris, dan karenanya hanyalah metode ilmu kealaman, dan dengan metode ini bermaksud *menghasilkan* ilmu yang pada dasarnya hanyalah sains atau ilmu-ilmu kealaman belaka; dan bahkan juga merupakan suatu usaha untuk *menerapkan* metode ilmiah yang sebenarnya hanyalah metode ilmu kealaman pada kenyataan apapun supaya *menghasilkan* – dan pengetahuan apapun yang dihasilkannya dapat dianggap sebagai – sains.

Maka, filsafat ilmu sebenarnya hanyalah filsafat yang hanya tepat untuk rumpun ilmu kealaman, dan bukan untuk rumpun-rumpun ilmu lainnya. Begitu pula metode ilmiah, yang sebenarnya hanyalah metode ilmu kealaman, hanyalah tepat jika digunakan untuk rumpun ilmu kealaman, dan tidak benar jika harus diterapkan pada rumpun ilmu lainnya. Dengan ini, maka, yang namanya metode ilmiah sebenarnya tidak harus berupa metode ilmu kealaman. Metode untuk memperoleh pengetahuan yang sah pada rumpun ilmu lainnya semestinya juga disebut metode ilmiah. Filsafat ilmu (yang positivistik ini), pada awalnya, dan sebenarnya, memang dirumuskan, terutama melalui metodenya yang bersifat faktual-empiris-eksperimental, tidak hanya untuk menolak metafisika, tetapi juga untuk menjustifikasi ilmu-ilmu kealaman sebagai satu-satunya pengetahuan yang sah.²³

Dengan ini, perlulah kiranya dirumuskan berbagai filsafat rumpun ilmu yang sesuai dengan hakikat tiap rumpun ilmu. Mengapa? Sekali lagi, karena tiap-tiap rumpun ilmu memiliki watak, ciri-ciri, pengertian, dan metode ilmiahnya sendiri. Dengan ini, maka, daripada menerapkan metode ilmu alam kepada masyarakat manusia, sebagaimana yang disarankan dan dilakukan para bapak pendiri filsafat

²³ Baca asal-muasal munculnya filsafat ilmu ini pada Murtadha Muthahhari, *Pengantar Ilmu-ilmu Islam*, 311-312.

ilmu berpendekatan positivistik ini,²⁴ para pengkaji rumpun ilmu kesosialan semestinya merumuskan suatu filsafat rumpun ilmu kesosialan.²⁵ Demikian juga, para pengkaji rumpun ilmu humaniora, keagamaan, termasuk keagamaan Islam, juga perlu merumuskan filsafat rumpun ilmunya yang khas.

Dengan mengingat bahwa inti persoalan di dalam filsafat ilmu adalah metode ilmiahnya,²⁶ maka penyelidikan pertama yang harus dilakukan di dalam filsafat rumpun ilmu adalah perumusan metode-metode ilmiah yang berbeda, yang khas bagi setiap rumpun ilmu.

Kesimpulan

Dari paparan singkat ini dapatlah diketahui bahwa filsafat ilmu telah gagal menjadi perenungan filsafat yang komprehensif dan memadai bagi semua ilmu. Kegagalan ini bukan hanya karena posisi epistemologi dan metafisikanya yang positivisti-materialistik, tetapi juga karena pada dasarnya setiap rumpun ilmu memiliki hakikat keilmuan yang khas dan berbeda satu sama lain. Tidak ada satu filsafat ilmu yang dapat menjelaskan semua rumpun ilmu. Dengan demikian, maka filsafat ilmu harus diruntuhkan, dan seterusnya perlulah dirumuskan filsafat rumpun ilmu. Yaitu, berbagai filsafat rumpun ilmu bagi setiap rumpun ilmu. Akhirnya, saran pertama yang harus dilakukan dalam merumuskan filsafat ilmu adalah merumuskan berbagai metode-metode ilmiah yang khas bagi setiap rumpun ilmu.

²⁴ Yang dimaksudkan di sini adalah Comte dan Emile Durkheim (Lihat Muhammad Muslih, *Filsafat Ilmu...*, 91.).

²⁵ Penggunaan metode ilmu alam untuk mengerti dan mempelajari masyarakat manusia oleh para ilmuwan beraliran positivisme dan positivisme logis mendapat kritik dari beberapa filsuf. Kritik atas penggunaan metode ilmu alam yang dipandang tidak tepat untuk mengkaji masyarakat manusia akhirnya melahirkan beberapa aliran dengan metodenya masing-masing (Baca *ibid.*, 141-179.).

²⁶ Menurut Samir Okasha, untuk memberikan jawaban singkat atas pertanyaan tentang apakah filsafat ilmu itu, maka jawabannya adalah metode-metode ilmu. Permasalahan khas di dalam filsafat ilmu, menurutnya, adalah metode ilmu (Samir Okasha, *Philosophy of Science...*, 13.).

Daftar Pustaka

- Abdullah, M. Amin, "Aspek Epistemologis Filsafat Islam" dalam Irma Fatimah, ed., *Filsafat Islam: Kajian Ontologis, Epistemologis, Aksiologis, Historis, Prospektif* (Yogyakarta: LESFI, 1992).
- _____, *Studi Agama: Normativitas atau Historisitas?* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004).
- Adian, Donny Gahral, *Menyoal Objektivisme Ilmu Pengetahuan: dari David Hume sampai Thomas Kuhn* (Jakarta: Teraju, 2002).
- Amien, Miska Muhammad, *Epistemologi Islam, Pengantar Filsafat Pengetahuan Islam* (Jakarta: UI-Press, 1983).
- Bagus, Lorens, *Kamus Filsafat* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2000).
- Beekman, Gerard, *Filsafat Para Filsuf Berfilsafat*, terj. R.A. Rivai (Jakarta: Erlangga, 1973).
- Bertens, K., *Sejarah Filsafat Yunani* (Yogyakarta: Kanisius, 2002).
- Borchert, Donald M., ed., *Encyclopedia of Philosophy* (New York: Thomson Gale, 2006).
- Cashdollar, Charles D., "Positivism" dalam Gary B. Ferngren, ed., *The History of Science and Religion in The Western Tradition: An Encyclopedia* (Garland: New York, 2000).
- Dalen, Deobold B. Van, "Ilmu-ilmu Alam dan Ilmu-ilmu Sosial: Beberapa Perbedaan", terj. Jujun S. Suriasumantri dalam Jujun S. Suriasumantri, ed., *Ilmu dalam Perspektif: Sebuah Kumpulan Karangan tentang Hakikat Ilmu* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2001).
- Gazalba, Sidi, *Sistematika Filsafat: Buku IV: Pengantar kepada Teori Nilai* (Jakarta: Bulan Bintang, 1973).
- Gie, The Liang, *Pengantar Filsafat Ilmu* (Yogyakarta: Liberty, 2007).
- Hadi, P. Hardono, "Pengantar" dalam Kenneth T. Gallagher, *Epistemologi (Filsafat Pengetahuan)*, ed. P. Hardono Hadi (Yogyakarta: Kanisius, 1999).
- Hardiman, F. Budi, *Filsafat Modern dari Machiavelli sampai Nietzsche: Suatu Pengantar dengan Teks dan Gambar* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004).
- Kaelan, "Membuka Cakrawala Keilmuan" dalam Muhammad Muslih, *Filsafat Ilmu: Kajian atas Asumsi Dasar Paradigma dan Kerangka Teori Ilmu Pengetahuan* (Yogyakarta: Belukar, 2004).

- Kartanegara, Mulyadhi, *Menyibak Tirai Kejahilan: Pengantar Epistemologi Islam* (Bandung: Mizan, 2003).
- Kattsoff, Louis O., *Pengantar Filsafat*, terj. Soejono Soemargono (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2004).
- Lacey, A. R., *A Dictionary of Philosophy* (New York: Routledge, 1996).
- Maritain, Jacques, *An Introduction to Philosophy* (New York: Sheed & Ward, 1947)
- Muslih, Muhammad, *Filsafat Ilmu: Kajian atas Asumsi Dasar Paradigma dan Kerangka Teori Ilmu Pengetahuan* (Yogyakarta: Belukar, 2008).
- Mustansyir, Rizal dan Misnal Munir, *Filsafat Ilmu* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012).
- Muthahhari, Murtadha, *Pengantar Ilmu-ilmu Islam*, terj. Ibrahim Husain al Habsyi dkk (Jakarta: Pustaka Zahra, 2003).
- Okasha, Samir, *Philosophy of Science: A Very Short Introduction* (New York: Oxford University Press, 2002).
- Rapar, Jan Hendrik, *Pengantar Filsafat* (Yogyakarta: Kanisius, 1998).
- Surajiyo, *Filsafat Ilmu dan Perkembangannya di Indonesia: Suatu Pengantar* (Jakarta: Bumi Aksara, 2010)
- Suriasumantri, Jujun S., *Filsafat Ilmu: Sebuah Pengantar Populer* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1987).
- Titus, Harold H., Marilyn S. Smith, dan Richard T. Nolan, *Persoalan-persoalan Filsafat*, terj. H. M. Rasyidi (Jakarta: Bulan Bintang, 1984).
- Waugh, Joanne dan Roger Ariew, "The History of Philosophy and The Philosophy of Science" dalam Stathis Psillos and Martin Curd, ed., *The Routledge Companion to Philosophy of Science* (New York: Routledge, 2008).

Nur Rahmad Yahya Wijaya